

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para pemimpin negara yang berjumlah 193 kepala negara termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut menghadiri dan mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada 25 September 2015 yang bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai respon kesepakatan pembangunan global. Menurut (Bhayu Pratama et al., 2020) SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana pembangunan global untuk 15 tahun kedepan berlaku mulai 2015 sampai 2030. Isu yang diusung guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan SDGs masih terdapat beberapa poin permasalahan yang sebelumnya sudah menjadi proyeksi dalam MDGs namun belum terselesaikan. Salah satu permasalahan tersebut adalah kemiskinan, dimana dalam SDGs masalah kemiskinan terletak pada tujuan pertama SDGs. Menurut (Moh. Taufik & Sugiharto, 2019) Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang kompleks di setiap negara berkembang seperti di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak dan perlu adanya alternatif jalan

keluar serta regulasi kebijakan yang diperlukan sampai saat ini. Kemiskinan disetiap negara pasti ada dan penanganannya tentu berbeda. Bahkan di setiap negara maju memiliki cara yang berbeda-beda untuk menekan angka kemiskinan negara tersebut. Di negara berkembang seperti Indonesia salah satunya dapat menjadi ajang politik berkampanye dalam pengentasan kemiskinan dan setiap akhir periode kepemimpinan akan mengalami penurunan.

Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Pengukuran tersebut mengukur penduduk miskin pada sisi pengeluaran atau konsumsi dasar baik dari sisi makanan maupun non makanan yang diukur dalam satuan rupiah per individu. Dengan demikian, penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata konsumsi di bawah garis kemiskinan. Berbeda halnya halnya di (World Bank Group, 2016) yang menitik beratkan ukuran kemiskinan pada kemampuan daya beli masyarakat atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Apabila pengeluaran atau konsumsi masyarakat per kapita di bawah US\$1,25 atau US\$2 per hari maka digolongkan dalam penduduk miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi dua kelompok besar (Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, 2017). Kelompok pertama terdiri dari program-program yang ditujukan hanya pada orang miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif, maka keluarga-keluarga miskin yang benar-benar menerima dampak dari program tersebut akan menikmati hampir seluruh manfaatnya. Kelompok

kedua terdiri dari program-program yang ditujukan tidak hanya untuk rakyat miskin tapi juga untuk masyarakat dari semua golongan pendapatan, tapi secara proporsional akan memberi manfaat lebih bagi rakyat miskin.

Presiden membentuk sebuah strategi pengentasan kemiskinan yang berada di pusat yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diatur sesuai dengan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2010) sebagai wujud intervensi pemerintah dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga tingkat daerah. Guna menjaga efektivitas penanggulangan kemiskinan maka dibentuk suatu tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD). TKPKD tingkat Provinsi diketuai oleh Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur. TKPKD Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Bappeda sebagai sekretaris TKPKD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 TKPKD di wilayah Kemantren/Kelurahan berganti nama menjadi Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) yang diketuai oleh Kepala Camat. Mekanisme kerja TKPKD diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kab/Kota, 2010) sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun mulai tahun 2015-2021. Secara umum angka kemiskinan di DIY menurun dari 14,91% tahun 2014 menjadi 11,7% tahun 2019. Pada tahun 2020-2021 kenaikan kemiskinan kembali meningkat dikarenakan seluruh dunia mengalami dampak dari Pandemi Covid-19. Secara umum angka kemiskinan di DIY meningkat dari 12,28 % di Tahun 2020 menjadi 12,80 % di 2022. Oleh sebab itu, seluruh aspek tidak bisa menjadikan masa pandemi sebagai tolak ukur keberhasilan tim dalam menanggulangi kemiskinan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu bagian sekaligus berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi DIY. Kota Yogyakarta satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota juga memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding 4 kabupaten di DIY. Namun letaknya yang strategis dan jumlah penduduk yang relatif kecil Kota Yogyakarta masih mengalami permasalahan terkait dengan kemiskinan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan presentase penduduk miskin Kota Yogyakarta meningkat menjadi 7,69% meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini tidak dapat dipisahkan dari dampak pandemic Covid-19 yang belum berakhir hingga tahun 2022. Jika dikonversi kedalam angka absolut jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 34.070 jiwa. Artinya, angka kemiskinan meningkat sebesar 0,42% dari sebelumnya atau jumlah penduduk

miskin meningkat sebanyak 2.450 orang. Angka tersebut diukur dengan standar garis kemiskinan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Ambang batas yang diterapkan di kota Yogyakarta saat ini adalah di atas Rp 500.000 per kapita per bulan. Artinya, seseorang yang tingkat konsumsi bulannya (pengeluaran makanan dan bukan makanan) lebih rendah dari ambang batas tergolong miskin.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021



Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019 cenderung menurun. Sedang pada tahun 2019-2021 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun ini erat kaitannya dengan adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada pengurangan karyawan perusahaan.

Adanya pandemi tersebut mengakibatkan pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang kemudian menjadi sebab melambatnya pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang menurun tentu akan meningkatkan angka kemiskinan. Pandemi telah memicu menurunnya perekonomian dan mengakibatkan kerusakan pada sektor kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan telah banyak dilakukan namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Yogyakarta secara signifikan saat pandemi melanda. Meskipun demikian, penurunan yang sudah terealisasi jelas tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga di Kota Yogyakarta sebagai Kawasan cagar budaya di Provinsi DIY. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Secara umum, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor lainnya yaitu jasa (62,76 persen) dan manufaktur (10,92 persen). Sementara itu, untuk rumah tangga tidak miskin pada umumnya juga berpenghasilan utama dari sektor lainnya (59,27 persen) dan manufaktur (10,71 persen).

Tabel 1.1 Presentase Status Pekerjaan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin

Status Pekerjaan	Ruta Tidak Miskin	Ruta Miskin
Tidak Bekerja	27.9	26.32
Berusaha Sendiri	19.67	19.78
Buruh Tidak Tetap	6.82	7.16
Buruh Tetap	42.32	38.33
Pekerja Bebas	3.28	8.41

Sumber : Data Susenas Maret 2021

Menurut data susenas 2021, di Kota Yogyakarta pada umumnya kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja formal. Pekerja formal adalah pekerja yang mempunyai status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai. Kepala rumah tangga miskin sebagian besar berstatus sebagai pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 38,33 persen. Sementara itu, kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja yang berstatus usaha sendiri sebesar 19,78 persen.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk Kota Yogyakarta selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pendekatan pelaksanaan SDGs yang dilaksanakan dengan *political will* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menetapkan sasaran kemiskinan masyarakat menurun pada (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Kota Yogyakarta, 2017). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran utama dalam pengentasan kemiskinan adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Koperasi UKM Nakertrans. Selain itu, juga

terdapat sinergi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun, kemiskinan masih menjadi agenda yang harus dituntaskan bersama berbagai pihak tidak hanya oleh OPD.

Pada saat ini TKPKD Kota Yogyakarta mempunyai Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) yang berada di kemitraan dan kelurahan. TKPKD Kota Yogyakarta terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0% di Tahun 2030. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan beberapa upaya, antara lain adalah perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas perumahan, pelatihan, program magang, dan melalui *Corporate Social Responsibility*.

Dengan adanya Tim Penanggulangan Kemiskinan yang sudah tersebar di setiap kemitraan dan kelurahan Kota diharapkan dapat menekan sekaligus menurunkan kemiskinan di wilayah Kota Yogyakarta. Melalui program kegiatan pembangunan berkelanjutan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2014 terlihat bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan presentase penduduk miskin dari 8,75% menjadi 6,84% di Kota Yogyakarta. Menurut data dari analisis kemiskinan makro Kota Yogyakarta tahun 2021, selain dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin, perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran penduduk. Pada tahun 2021, untuk kelompok penduduk sangat miskin sebanyak 5.121

(1,16 persen), sedangkan yang miskin sebanyak 29.278 (6,61 persen). Sedangkan rentan miskin lainnya dan hampir miskin lebih besar jumlahnya yaitu 34.615 (7,82 persen) dan 30.955 (6,99 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan salah satu imbas dari wabah Covid-19.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah strategi yang mempengaruhi keberhasilan tim dalam mencapai tujuannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneliti tentang Bagaimana Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SDGs Kota Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Dari hasil analisis latar belakang di atas, program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan ternyata sudah relevan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Yogyakarta secara signifikan. Dimana pada tahun 2015-2019 kualitas capaian Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Yogyakarta sudah berhasil menurunkan presentase kemiskinan, sehingga penulis mencoba merumuskan masalah : Bagaimana Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SDGs Kota Yogyakarta.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu, untuk mengetahui Strategi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SDGs Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan studi terkait monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus menilai kualitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kota Yogyakarta.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah : Kontribusi bagi pemerintah khususnya pada instansi TKPKD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan, serta bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja strategi program supaya menjadi lebih maksimal.
2. Bagi Masyarakat : Memberikan referensi terkait transformasi suatu sistem penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta dan pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kota.
3. Bagi Peneliti : Menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang terkait kualitas kelembagaan untuk pengembangan dan perbaikan pemerintah setempat.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Alfisyahrin, 2021)	Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang	Kebijakan (TKPKD) Kota Semarang tentang penanggulangan kemiskinan mulai dari verifikasi database warga miskin, penyusunan program penanggulangan, pelaksanaan program penanggulangan, serta evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan program. Berdasarkan diskresi implementasi kebijakan dapat dikatakan TKPKD Kota Semarang bisa bertanggungjawab pada masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
2.	(Sumbogo, 2019)	Evaluasi Kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Program Grindulu Mapan Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2016 Sampai Tahun 2018 di Kabupaten Pacitan	Terdapat faktor penghambat kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Program Grindulu Mapan sehingga kurang optimal, yaitu Kurangnya pendekatan Perencanaan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG) pada setiap tahapan program kemudian sosialisasi tujuan program penanggulangan kemiskinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan masyarakat belum dilakukan secara optimal serta Bansos yang dinilai tidak tepat waktu sehingga perlu

			upaya pendampingan yang intensif kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan.
3.	(Azhari, 2022)	Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Pekanbaru	Strategi yang dikembangkan oleh TKPK Provinsi Riau dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha UMKM/IKM tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya kontribusi tim dalam program yang dijalankan.
4.	(Setiani, 2022)	Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora Tahun 2021	Implementasi dan hasil percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora bersama TKPKD. Hasil dari program percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2016-2020 dikatakan berhasil, sehingga kenaikan yang terjadi pada 2020 bukan disebabkan karena kurangnya upaya dari pemerintah kabupaten dan TKPKD melainkan karena wabah Covid-19.
5.	(Bhayu Pratama et al., 2020)	Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Mengurangi proporsi kemiskinan, menerapkan sistem perlindungan sosial terdampak, membangun ketahanan sosial ekonomi, dan menjamin hak kemudahan pelayanan. Dari 4 (empat) tujuan dalam rangka menghapus kemiskinan melalui RPJMD 2017-2022 dikatakan sudah mampu mengurangi angka

			kemiskinan secara multidimensional di Provinsi DIY.
6.	(Satibi & Sudrajat, 2019)	Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya	Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) tidak hanya berbentuk bantuan, namun juga pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas potensi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
7.	(Moh. Taufik & Sugiharto, 2019)	Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal	Efektivitas dalam penerapan kebijakan program pengentasan kemiskinan ditentukan oleh keterpaduan data dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan antar dinas yang terkait program pengentasan kemiskinan.
8.	(Ramadhani, 2021)	Efektifitas Pemberdayaan Usaha Program Gerbangmas-Taskin Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Unit Pelaksana Keuangan (UPK) Di Kota Banjarbaru	Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru, dinilai sepenuhnya belum efektif dalam membantu pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Hal tersebut disebabkan karena partisipasi rumah tangga miskin (RTM) penerima program dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan

			dengan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan kelompok miskin dinilai masih rendah.
9.	(Larantika, 2019)	Kolaborasi Aktor Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung Provinsi Bali	Proses kolaborasi dalam melaksanakan keputusan dengan berkoordinasi antar aktor/OPD yang saling berkaitan dalam satu program. Penilaian dalam proses kolaborasi dalam melaksanakan program juga perlu dilakukan antar OPD, rapat evaluasi TKPKD, laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD), serta kinerja TKPKD.
10	(Fadilla, 2017)	Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten	Pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD). TKPKD melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang dapat dikatakan memberikan hasil positif dengan indikator turunnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan meningkatnya Harapan Hidup.

Penelitian sebelumnya terfokus pada berbagai efektivitas kebijakan yang dijalankan dalam menanggulangi kemiskinan dan implementasinya pada masyarakat. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji terkait strategi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta. Selain itu, yang membedakan penelitian ini adalah peneliti akan berkolaborasi dengan BAPPEDA Kota Yogyakarta secara langsung dalam menyusun instrumen dan pemilihan sample penelitian. Adanya perbedaan teori, topik pembahasan serta metode penelitian ini juga membedakan dengan penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Strategi

a) Definisi Strategi

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretaus* dengan kata jamak *strategi*. Salah satu parameter yang ada dalam sebuah program kebijakan suatu organisasi/instansi yaitu sebuah strategi. Tujuan strategi berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Strategi menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir dimana strategi merupakan rancangan yang disatukan.

Menurut Jack Trout dalam bukunya *Trout On Strategy* (dalam M Suyanto, 2007), strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi baik menurut konsumen, berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan lawan, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas lingkungan dengan jadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik.

Menurut Potter (1998) (dalam Arifin, 2017) mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan dimasa mendatang. Menurut Brecker (dalam Saputra & Rulandari, 2020) penggunaan kata Strategos dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki. Jadi, strategi merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan yang sudah terancang atau terencana dengan matang untuk mencapai tujuan akhirnya.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan aktivitas mulai dari manajemen perencanaan sampai dengan menggunakan Teknik operasional untuk mencapai tujuan akhir atau target yang telah ditentukan.

b) Tipe – tipe Strategi

Menurut Kotten (Prof.Dr.J. Salusu, 2006 : 104-105) membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah sebagai berikut :

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah visi dan misi.

2. Strategi Program (*Program Strategy*) Strategi program ini lebih memberikan berfokus pada implikasi stratejik dari suatu program. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi akan memberikan dampak positif baik terhadap instansi maupun masyarakat, atau malah sebaliknya.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah pemerintah daerah atau instansi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah :
 - a. Sarana dan Prasarana atau yang lebih dikenal dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memudahkan pekerjaan atau gerak aktivitas dari instansi daerah maupun Pemerintahan Daerah.
 - b. Sumber Daya Manusia merupakan suatu aset atau modal non-material yang harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari suatu instansi yang merupakan mesin penggerak pelaksanaan segala program dan kegiatan dari sebuah instansi tersebut.
 - c. Sumber Daya Finansial Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah instansi. Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan baik jika tidak didukung oleh ketersediaan finansial dalam sebuah instansi.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*) dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu organisasi atau instansi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana instansi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, SOP, tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.

1.6.2. Kemiskinan

a) Definisi Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan berarti hal miskin, keadaan miskin. Namun tidak semua orang yang tidak berharta dan serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) bisa disebut orang miskin. Menurut Nasikun (Larantika, 2019) kemiskinan merupakan fenomena multifaset, multidimensi, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya hidup dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Namun hidup dalam kemiskinan juga sering berada dalam keterbatasan akses terhadap ragam sumber daya dan asset produktif yang sangat diperlukan untuk memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan hidup seperti, Pendidikan, informasi, teknologi, dan pekerjaan. Terkadang hidup dalam kemiskinan juga berarti hidup dalam keterbatasan akses terhadap kekuasaan.

Untuk mengetahui suatu kondisi kemiskinan maka dapat diukur berdasarkan beberapa indikator. Menurut Adisamita (D Ferezegia & Vita, 2018) indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat

upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anakm tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhana bangun pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per-kapita dan distribusi pendapatan.

b) Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Chambers (A Khomsan et al., 2015) kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk :

1. Kemiskinan absolut : apabila pendapatan berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relative : kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar

4. Kemiskinan structural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

1.6.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat internasional sebagai tindak lanjut program dari *Millenium Development Goals* MDGs tahun 2015 yang belum terselesaikan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) mempunyai kerangka kerja jangka waktu 15 tahun kedepan diberlakukan sejak 2015-2030. SDGs cenderung bersifat lebih fokus dan birokratis (Wahyuningsih, 2017). Dalam susunan program SDGs terlihat lebih inklusif dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Poin-poin SDGs merupakan hasil dari proyeksi MDGs yang sebelumnya belum terselesaikan. Salah satu masalah yang menjadi fokus adalah kemiskinan yang terletak pada tujuan atau poin pertama dalam SDGs (Bhayu Pratama et al., 2020).

Adapun 3 pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs adalah, pertama mengenai pembangunan manusia (*human development*) yang meliputi Pendidikan dan Kesehatan. Kedua mengenai lingkungan dalam arti kecil (*social economic development*) meliputi ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Terakhir yaitu lingkungan dalam arti luas (*environmental development*) yang meliputi ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan

kualitas lingkungan (Wahyuningsih, 2017). Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) disusun berdasarkan beberapa ruang, yaitu meliputi kelembagaan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Terdapat 17 tujuan/poin dalam SDGs dan jumlah indikator pengukurannya (Setianingtias et al., 2019).

Gambar 1. 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)



Sumber : <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>

Kemiskinan dijadikan sebagai tujuan pertama dalam SDGs karena merupakan masalah yang sangat fundamental dan merupakan faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan juga menyebabkan beban yang berat bagi negara, ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai salah satu prioritas

utama dalam SDGs untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

1.6.4. Pemerintah Daerah

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam pasal 18 UUD NKRI menegaskan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pemerintah daerah merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerahnya sendiri dalam melaksanakan wewenang dan tugas tertentu dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah (Pratiwi, 2021).

Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 pasal 120 yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Abbadi et al., 2020).

Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam kebijakan tersebut tergambar bahwa perangkat daerah terbagi atas lima unsur yaitu :

1. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat.
2. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat.
3. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan.
4. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan edaerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
5. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.
(Mustanir, Hamid, and Syarifuddin 2019)

1.6.5. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi dari kumpulan faktor untuk merumuskan strategi suatu organisasi/instansi. Menurut (Freddy Rangkuti, 1997) Analisis ini didasarkan pada beberapa poin dengan memaksimalkan Kekuatan (*Strength*), Peluang (*Opportunity*), secara bersamaan dapat meminimalisir Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*). Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan kebijakan atau mengidentifikasi objek yang akan diteliti. Peluang dan ancaman dikemompokkan sebagai faktor eksternal. Sedangkan kekuatan dan kelemahan dikelompokkan kedalam faktor internal.

Menurut (Pearce Robinson, n.d.) analisis SWOT adalah sebuah cara sistematis untuk mengidentifikasi berbagai faktor dan strategi yang memudahkan dalam proses analisis pengambilan kebijakan. Analisis ini didasarkan pada suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Bila sudah di plotkan secara sistematis asumsi ini mempunyai dampak yang sangat besar dan strategi yang diterapkan berjalan dengan baik dan berhasil untuk keberlanjutan kebijakan tersebut.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Strategi

Strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai suatu tujuan atau solusi masalah yang spesifik, membantu menentukan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

1.7.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang/kelompok mengalami kesulitan dan kekurangan dalam perekonomian baik dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya maupun tidak mempunyai tempat tinggal yang layak huni.

1.7.3. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah terobosan program Internasional dalam menangani permasalahan global yang berfokus pada beberapa dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mempunyai tujuan yaitu membangun sebuah tatanan hidup pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan yang lebih baik dari sebelumnya.

1.7.4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan sekelompok orang atau instansi yang diberikan amanat serta mempunyai wewenang kekuasaan dalam

mendukung melaksanakan tupoksinya maupun mengayomi masyarakat di suatu daerah. Untuk menunjang keberhasilan tujuan suatu Lembaga pemerintah daerah dibantu oleh perangkat-perangkat daerah yang berbentuk sudah ditetapkan maupun bersifat ad hoc/sementara.

1.7.5. Analisis SWOT

Analisis sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi pembuatan strategi kebijakan yang akan diterapkan untuk keberlanjutan suatu sistem kebijakan roda pemerintahan.

Tabel 1. 2 Analisis SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (S – <i>Strength</i>)	Kelemahan (W – <i>Weakness</i>)
Peluang (O - <i>Opportunities</i>)	Strategi – SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi – WO Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman (T - <i>Threats</i>)	Strategi – ST Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi – WT Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan dan cara untuk mengukur variable yang akan diteliti oleh peneliti. Definisi operasioanl disusun dalam bentuk matrik yang berisi : tujuan, nama variable, dan indikator variabel.

Menurut (Ulfa, 2021) Definisi operasional disusun untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel.

Tabel 1.3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Strategi Organisasi	a. Perumusan strategi melalui visi dan misi	Visi dan Misi TKPKD Arah kebijakan TKPKD Strategi yang digunakan oleh TKPKD
	b. Perumusan visi dan misi ke dalam suatu program atau kegiatan	Program yang disahkan kedalam regulasi
Strategi Program	a. Fokus keterlibatan strategi	Strategi yang diturunkan kedalam suatu program kegiatan Tupoksi <i>Stakeholder</i> : Masyarakat, OPD, dan Swasta
	b. Aspek strategi program	Upaya pembuatan program Dampak positif terhadap instansi dan masyarakat
Strategi Pendukung Sumber Daya	a. Sarana dan Prasarana	Penyediaan disesuaikan dengan program yang berlaku
	b. Sumber Daya Manusia	OPD, Non-OPD, Kemantren, dan Kelurahan
	c. Sumber Daya Finansial	Sumber Dana Jumlah dan Rata-rata realisasi anggaran
Strategi Kelembagaan	a. Penguatan strategi Lembaga dalam menghadapi permasalahan	Saluran Komunikasi Forum memecahkan masalah

	b. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Berapa SOP yang dibuat Regulasi Pemerintah Daerah
--	---	--

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik Analisis Data. Teknik analisis data menurut (Farida Nugrahani, 2014) merupakan pengaturan sistematis bahan wawancara dan observasi dalam menafsirkan data yang diperoleh. Dengan kata analisis data disini merupakan pengolahan dari data- data yang didapatkan oleh peneliti baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan terhadap objek penelitian, sehingga bermanfaat dalam penguatan data dalam penelitian yang sedang dilakuan.

1.9.2. Unit Analisa

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, maka unit analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Yogyakarta.

1.9.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer atau biasa disebut data utama didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara, kemudian hasilnya diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi kata. Sumber data dari penelitian

didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang ditujukan pada sampel terpilih yang sudah di tentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak atau melalui perantara. Data sekunder secara universal berbentuk catatan, bukti, atau laporan yang tersusun dalam arsip atau biasa disebut dengan data dokumenter.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi oleh 2 orang atau lebih yang terdiri dari informan dan narasumber, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dimana salah satu pihak bertujuan memperoleh informasi dari lawan bicaranya yaitu narasumber.

Menurut (Dr.R.A.Fadhallah, 2020) keuntungan menggunakan wawancara antara lain :

1. Jawaban informan dapat lebih tepat dikarenakan informan memiliki kesempatan bertanya dan pencari informasi dapat menjelaskan maksud dari pertanyaannya.
2. Menghindari kesalah pahaman antara informan dengan pencari informasi sehingga dapat menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari interviewe secara cepat.
3. Lebih bersifat fleksibel.

Tabel 1.4 Wawancara

Narasumber	Jabatan
Kepala TKPKD Kota Yogyakarta	Wakil Walikota Yogyakarta
Sekretaris TKPKD Kota Yogyakarta	Kepala BAPPEDA
Narasumber	Jabatan
Kelompok Kerja TKPKD Kota Yogyakarta	Sub Bagian Kelompok Kerja TKPKD Kota Yogyakarta
Masyarakat terdampak miskin	Masyarakat yang merasakan perbedaan setelah mengikuti program

Peneliti telah berhasil mendapatkan data primer melalui beberapa narasumber dari hasil wawancara yang dilakukan kepada :

1. Kepala TKPKD yang dilimpahkan kepada BAPPEDA Kota Yogyakarta
2. Sekretaris TKPKD yang dilimpahkan ke bidang PPM BAPPEDA Kota Yogyakarta
3. Sub Bagian Kelompok Kerja TKPKD Kota Yogyakarta yang diwakili oleh staf ahli pengolah data kemiskinan
4. Dan 3 sample masyarakat penerima bantuan BLT, Non BLT, dan Penerima Alat Produksi

b. Dokumentasi

Dalam penelitian dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian guna menunjukkan kebenaran data selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dokumentasi berbentuk data ataupun laporan yang berkaitan dengan kegiatan mengatasi kemiskinan di Kota Yogyakarta.

1.9.5. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data (*Data Collection*) Menurut (Thalha et al., 2019)
 Pengumpulan data merupakan sebuah teknik bagian yang diperlukan peneliti, peneliti harus sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan

yang dirumuskan dalam fokus penelitian. Setiap rumusan pertanyaan membutuhkan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Tekniknya berupa wawancara, teknik observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*Data Reduction*) Reduksi data menurut (Rijali, 2018) merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya dengan menyeleksi data secara ketat, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan kedalam pola yang lebih luas. Berdasarkan teori diatas maka, dalam tahap ini peneliti melakukan seleksi data untuk memilah data mana yang bisa digunakan ataupun relevan terhadap penelitian tersebut.
3. Mengolah Data Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengolahan data setelah data terpilah dengan baik. Pengolahan data tersebut bertujuan untuk mengolah data yang sudah direduksi. Data – data yang sudah diolah tersebut akan digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini.
4. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data menurut (Rijali, 2018) merupakan aktivitas Menyusun informasi sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif bebrbentuk catatan, matriks, jaringan, began, dan grafik. Penggabungan informasi ini memudahkan untuk melihat hasil penelitian apa yang sedang terjadi, apakah sudah tepat atau harus menganalisis ulang. Dalam tahap ini

penulis akan menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti : gambar, grafik, bagan, tabel, dan ilustrasi.

5. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*) menurut (Rijali, 2018) Penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai kegiatan hasil analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan : judul penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, data yang ada dalam penelitian, teori yang relevan dan temuan dari hasil analisis data dalam penelitian.